

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara besar dengan ribuan pulau yang dimiliki, menjadikan negara ini tumbuh dengan jumlah penduduk yang besar, bahkan lebih dari 200 juta orang, jumlah penduduk yang sangat besar apabila dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara (Latief 2010:5). Akan tetapi, permasalahan kemiskinan di Indonesia yang selama ini menjadi masalah yang sangat memprihatinkan belum menemui titik temu untuk upaya penegasannya, berbagai program yang diupayakan baik para pemimpin pemerintahan maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) belum juga efektif dalam mengetaskan masalah kemiskinan di Negeri ini.

Menurut BPS definisi penduduk miskin adalah penduduk yang konsumsinya berada dibawah garis kemiskinan, sementara pendapatan perkapita penduduk yang berada pada garis kemiskinan di wilayah Yogyakarta, pada periode 2013 sesuai berita statistik BPS provinsi sebesar Rp 303.843,00 perbulan (www.bps.go.id). Selain itu menurut Suparno salah satu staff BPS Provinsi Yogyakarta, menyebutkan bahwa definisi kemiskinan adalah masyarakat yang nilai konsumsinya di bawah 2.100 kilokalori perhari

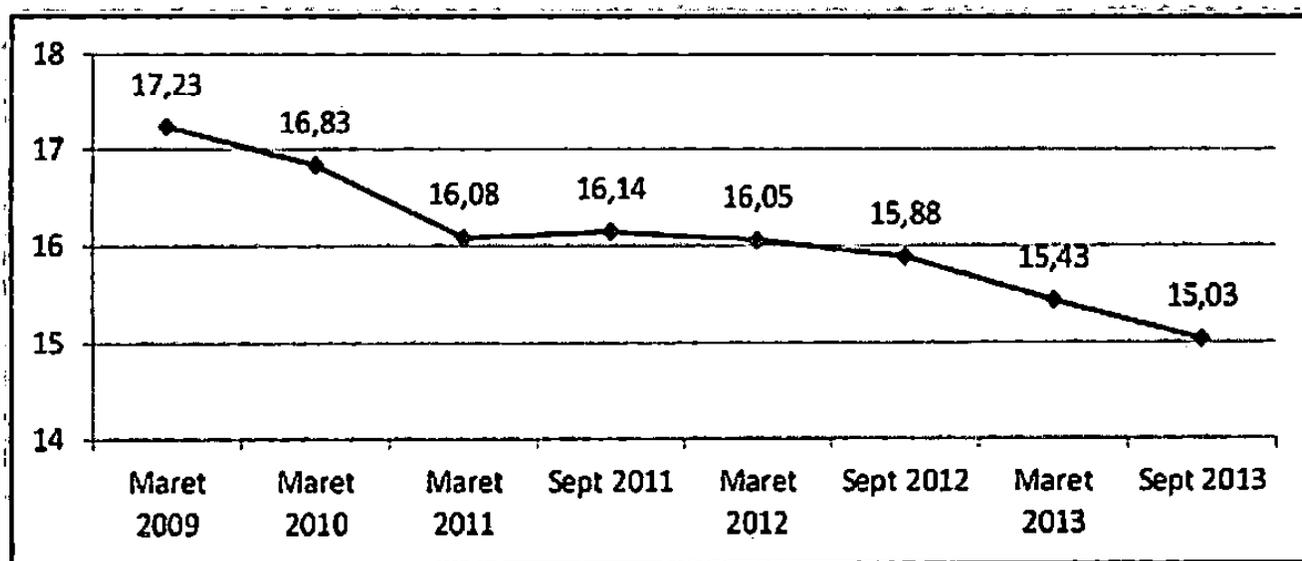
untuk menghitung garis kemiskinan sementara dengan menggunakan rumus garis kemiskinan tahun lalu ditambah inflasi (wawancara tanggal 14 Juli 2014 di Kantor BPS DIY).

Menurut Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Indonesia dalam kurun waktu enam bulan (Maret-September) menunjukkan peningkatan jumlah masyarakat miskin, yaitu pada bulan September 2013 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan jumlah pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,55 juta orang (11,47 %) bertambah sebanyak 0,48 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang sebanyak 28,07 juta orang (11,37 %). Dari fenomena ini dapat disimpulkan bahwa pada enam bulan terakhir dari bulan Maret-September 2013, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,30 juta orang (dari 10,33 juta orang pada bulan Maret 2013 menjadi 10,63 juta orang pada September 2013) sementara di daerah perdesaaan naik sebesar 0,18 juta orang (dari 17,74 juta orang pada bulan Maret 2013) menjadi 17,92 juta orang pada bulan September 2013 (yogyakarta.bps.go.id).

Akan tetapi berbeda halnya dengan keadaan di Yogyakarta, yang mana

.....

Gambar 1.1
Masyarakat Miskin Yogyakarta
Persentase Penduduk Miskin
di Daerah Istimewa Yogyakarta Maret 2009 - September 2013



Sumber Susenas dalam www.Republika.co.id.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Yogyakarta 2012, tingkat kemiskinan di wilayah DIY pada akhir 2012 lalu mencapai 15,88% (BPS Yogyakarta, 2013:236). Data ini mengalami penurunan dari data kemiskinan pada bulan Maret 2012 yang mencapai 16,05%. Sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan yaitu bulan Maret 15,43% menjadi 15,03% pada September, sehingga pada tahun 2012 - 2013 wilayah ini mengalami penurunan sebesar 0,85 persen. Meskipun mengalami penurunan tingkat kemiskinan, akan tetapi jumlah ini masih merupakan yang tertinggi di pulau Jawa. Dari data surat kabar Republika, tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa

kemiskinan tertinggi se-Jawa. Tingkat kemiskinan di wilayah ini bahkan jauh lebih tinggi dari DKI Jakarta, Banten dan Jawa Tengah. (www.Republika.co.id).

Selain kemiskinan, pengangguran adalah salah satu kendala yang harus diantisipasi dan diselesaikan. Definisi dari pengangguran adalah penduduk yang berusia di atas 15 tahun akan tetapi mereka tidak bekerja, dan lagi mencari pekerjaan, mereka yang lagi mempersiapkan usaha, mereka yang tidak punya kerjaan tetapi tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta mereka yang sudah dapat bekerja tapi belum mulai bekerja (BPS, 2012:xiii).

Banyaknya program pemerintah yang telah direncanakan untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan pengangguran kurang berjalan dengan baik, sehingga munculah lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang berusaha untuk mengurangi permasalahan kemiskinan dan pengangguran tersebut, yaitu dengan pemanfaatan dan optimalisasi instrumen zakat, infaq, shadaqah dan wakaf ZISWAF (Anshori, 2006: 195), yang mana perkembangan organisasi atau lembaga filantropi yang terfokus pada pengelolaan ZISWAF paska dekade 1990 sangat menggembirakan (Kholis, 2013: 61).

Salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang muncul dan

selanjutnya disingkat DD Republika, yang berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern dalam pengelolaannya. Selain DD Republika, lembaga sosial lain yang berkecimpung pada pemberdayaan masyarakat melalui dana Ziswaf antara lain, Rumah Zakat, Lazismu, Pos Keadilan Peduli Ummat, dll.

Lembaga filantropi Islam adalah salah satu organisasi yang berasaskan kedermawanan, yang memiliki persamaan persepsi untuk merubah kondisi sosial ekonomi muslim yang masih berputar pada masalah kemiskinan. Sehingga perlu disadari bahwa upaya untuk mengurangi kemiskinan harus memanfaatkan segala potensi sumber daya terutama masyarakat, karena masyarakat adalah sumber dana yang potensial (Zuhdi, 1987: 235). Hal serupa juga diucapkan oleh Hamid Abidin, selaku *Executive Director PIRAC (Public Interest Research and Advocacy Center)*,

“Dalam konteks penggetasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama dan khususnya pemerintah karena memiliki wewenang, otoritas dan sumberdaya (Matahati, 2013: 13)“.

Filantropi Islam di Indonesia memberikan sumbangan informasi yang cukup kaya dan menarik serta analisis yang penting tentang hubungan antara agama dan kedermawanan. Kajian tentang Filantropi Islam masih sangat sedikit dibandingkan dengan topik agama dalam aspek zakat, meskipun zakat adalah salah satu rukun Islam. Akan tetapi beberapa kajian tentang zakat di Universitas Islam masih hanya sekedar berputar pada aspek

Menanggapi masalah kemiskinan ini, Suhiroh, selaku wakil ketua PD Aisyiyah Pekalongan mengatakan

“Untuk implementasi gagasan Al-maun itu, warga Muhammadiyah dan Aisyiyah pada dasarnya sudah melakukannya, yaitu misalnya dengan menjadi donatur untuk TPA-TPA bagi anak-anak kurang mampu, kegiatan mengumpulkan donatur untuk mendirikan lembaga lembaga pendidikan lain”. Ini merupakan bentuk kedermawanan yang terkandung dalam filantropi (Suara Muhammadiyah 2006: 8).

Dari pemaparan di atas maka banyak pengelola zakat, infaq, serta shadaqah yang mampu memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, akan tetapi untuk melepaskan masyarakat dari kemiskinan dan pengangguran seperti ini membutuhkan cara yang tepat, sesuai, bijaksana dan dapat dipertanggung jawabkan. Pemberian bantuan secara konsumtif kepada masyarakat kurang mampu hanya akan membuat masyarakat itu kurang mandiri dan selalu bergantung pada orang lain, pemberian semacam ini hanya mampu mengurangi kemiskinan tetapi tidak akan mampu mengentaskannya. Kemiskinan serta pengangguran adalah permasalahan sosial yang harus segera diatasi. Salah satu cara pengentasannya dengan mendidik mereka hidup mandiri, yaitu dengan cara-cara yang dapat memberikan mereka rasa tanggung jawab, serta memaksa penerima bantuan untuk bekerja dengan memberikan modal kepada mereka, kemudian diminta untuk mengelola usahanya masing-masing (Zuhdi, 1987:240).

Sedangkan menurut Muhammad Irsyad Al Banjari dalam Rianto,

dikarenakan dengan cara ini besar harapan agar para mustahik berubah menjadi muzakki bukan malah menjadi mustahik selamanya karena menurutnya bahwa dana yang dialokasikan secara konsumtif akan menjadikan penerima semakin malas dan akan menyuburkan kemiskinan. Dan apabila zakat dikembangkan secara produktif akan sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan oleh mustahik secara berkesinambungan (Rianto, 2012;390).

Untuk itu diperlukan solusi yaitu melalui pemanfaatan dan optimalisasi instrumen zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Salah satu lembaga nirlaba yang bergerak dibidang ini adalah Dompot Dhuafa yang berdiri pada tahun 1993 dari empati kalangan muda jurnalis Koran Harian Republika. (www.dompetdhuafa.org).

Selama beberapa tahun mengemban amanat umat, DD Pusat sudah memiliki beberapa cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan mempunyai cabang pembantu di Luar Negri. Akan tetapi (menurut Renny Sudarti *Costumer Relation Management*), saat ini kantor kantor cabang diberikan izin dalam pengumpulan dana dan penyalurannya sudah

Dari latar belakang masalah di atas, hal yang paling menarik penulis untuk dikaji adalah peranan lembaga filantropi dalam penyaluran dana ZIS untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan ekonomi, melalui pemberian solusi kepada masyarakat untuk kategori pengangguran dan miskin. Maka penulis mengambil judul **“ANALISIS PENYALURAN DANA ZIS PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI (Studi pada Program Ekonomi Institut Mentas Unggul Dompot Dhuafa Yogyakarta)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyaluran dana ZIS melalui program Institut Mentas Unggul pada masyarakat kurang mampu dan pengangguran di Yogyakarta?
2. Bagaimana hasil dari penyaluran dana ZIS Dompot Dhuafa pada program Institut Mentas Unggul di Yogyakarta?

BAB II

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penyaluran dana ZIS melalui program Institut Mentas Unggul pada masyarakat kurang mampu dan pengangguran di Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui hasil penyaluran dana ZIS Dompot Dhuafa pada program Institut Mentas Unggul di Yogyakarta.

B. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi dan teoritis, bahkan lembaga atau institusi yang berkecimpung dalam hal ini. Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Akademisi
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran tentang pengelolaan ZIS yang baik dan profesional.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran tentang manajemen pengelolaan zakat.
 - c. Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman yang menjadi bekal bagi penulis untuk masa depan, yang sesuai

2. Kegunaan Praktisi

- a. Sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya guna memberikan gambaran akan masalah yang akan diteliti.
- b. Memberi pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya berzakat, infaq, shadaqah dan wakaf, sehingga masyarakat aktif dan ikut serta membantu pemerintah untuk menentaskan kemiskinan melalui lembaga amil zakat.
- c. Menjadi tolak ukur bagi lembaga yang bersangkutan, sehingga dapat mengevaluasi kekurangan guna meningkatkan kinerja pengelola atau amil.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada peranan lembaga amil zakat Dompet Dhuafa Republika cabang Yogyakarta, terhadap masyarakat miskin dan

1. Masyarakat melalui program pemberdayaan